

## **BAB II**

### **Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia**

Dalam mewujudkan cita-cita feminis yang terdapat dalam kebijakan luar negeri, diwujudkan dalam enam kebijakan eksternal Swedia. Bab ini akan menjelaskan masa pemilihan umum tahun 2014 di Swedia dan menangnya Koalisi Partai Sosial Demokrat Swedia dengan Partai Hijau dalam menduduki kursi pemerintahan. Setelahnya bab ini akan menjelaskan mengenai enam kebijakan eksternal feminisme Swedia dan penerapannya oleh Kementerian Luar Negeri Swedia dan SIDA (*Swedish International Development Cooperation*). Kedua lembaga ini merupakan aktor yang berperan besar dalam penerapan serta aktualisasi kebijakan luar negeri feminis.

#### **2.1. Masa Pemilu Swedia Tahun 2014**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kebijakan Feminisme Swedia ini merupakan hasil pemikiran dari dua koalisi partai yang mengisi parlemen Swedia pada 2014. Sebelum dua koalisi tersebut mengisi pemerintahan Swedia Koalisi antara Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau Swedia yang memenangkan Pemilu Swedia pada tahun 2014. Pada tanggal 14 September 2014, Swedia menyelenggarakan pemilu nasional dimana masyarakat Swedia akan memilih 349 anggota Parlemen Swedia (*Riksdag*) serta memilih anggota representasi lokal (anggota konsil kota dan anggota konsil negara) (Deloy, 2014). Swedia merupakan sebuah negara dengan sistem demokrasi parlementer, adapun Parlemen Swedia (*Riksdag*) yang menganut sistem *threshold* dimana sebuah partai harus memenuhi persyaratan kuota 4% dari keseluruhan suara nasional agar dapat duduk dalam parlemen. Parlemen Swedia merupakan badan yang merepresentasikan masyarakat Swedia. Tugas dari parlemen ialah untuk membuat dan merumuskan kebijakan, menjalankan pemerintahan sebagaimana halnya badan eksekutif. Untuk dapat memimpin pemerintahan, anggota parlemen akan menunjuk seorang perdana menteri dan perdana menteri selanjutnya menunjuk menteri-menteri yang akan bertugas untuk membantunya (Welsink & Boyd 2018).

Pemilu tahun 2014 ini diikuti oleh 9 partai Swedia dan inkumben. Adapun partai yang mengikuti pemilu tersebut yakni Partai Sosial Demokrat, Partai Moderat, Partai Demokrasi Swedia, Partai Hijau, Partai Tengah (Center Party), Partai Kiri (Left Party), Partai Liberal, Partai Demokrat Kristen dan Partai Insisiasi Feminis (Rivera 2014). Pemilu Swedia dilaksanakan empat tahun sekali dengan persyaratan peserta pemilu yang merupakan warga negara Swedia diatas 18 tahun. Biasanya pemilu untuk anggota parlemen dilaksanakan pada minggu ketiga September. Setiap kandidat parlemen ialah warga negara Swedia yang telah memenuhi syarat dapat memilih. Pemilu Swedia berpegang teguh pada prinsip representasi proporsional dimana untuk memastikan kursi parlemen terdistribusikan dengan baik dan diisi oleh setiap partai politik agar dapat merepresentasikan suara rakyat. Untuk jabatan perdana menteri sendiri, biasanya partai yang memegang suara terbanyak berhak mendapatkannya (Swedish Institute 2014).

Selama beberapa dekade, Partai Sosial Demokrat Swedia memegang peran dominan dalam politik Swedia. Namun, setelah 30 tahun terakhir ini, kendali kuasa parlemen Swedia berganti dari sosial demokrat dan blok-sosial demokrat (Swedish Institute 2014). Dengan memenangkan sebanyak 1.832.711 suara pada pemilu tahun 2014, Partai Sosual Demokrat Swedia berhasil menduduki kursi parlemen dengan bobot persentase 31% dan 113 kursi (Rivera 2014). Ditunjuknya Stefan Lovfen pemimpin partai Sosial Demokrat Swedia sebagai Perdana Menteri Swedia. Lofven kemudian membentuk koalisi pemerintahan dimana Partai Sosial Demokrat beserta Partai Hijau Swedia yang memiliki total 6,9% suara sehingga bila digabung koalisi ini memiliki 37,9% suara untuk memimpin parlemen. Walaupun koalisi partai tengah-kanan (*centre-right alliance*) yang terdiri dari Partai Moderat, Partai Demokrasi Swedia, Partai Tengah (*Center Party*), Partai Kiri (*Left Party*), Partai Liberal, Partai Kristen Demokrat dan Partai Inisiasi Feminis memiliki 39,4% total suara namun dikarenakan Swedia yang memiliki sistem parlementer unikameral diiringi dengan sistem parlementarisme negatif yang memungkinkan Lofven dan koalisinya tetap

menjadi koalisi pemegang kekuasaan (Swedish Institute 2014). Sistem parlementarisme negatif adalah sistem parlementer dimana untuk dapat duduk dalam kursi parlementer dan membentuk kabinet pemerintahan baru, suatu koalisi yang menang tidak harus memiliki jumlah suara mendukung yang terbanyak dengan kata lain kabinet yang ingin berkuasa tetap dapat menjalankan pemerintahan dengan dukungan minim (Louwerse,2014). Dengan menangnya koalisi yang dipimpin oleh Stevan Lofven ini, maka pembentukan kabinet dan jajaran menteri dalam Pemerintah Swedia dibentuk dan mempengaruhi enam kebijakan luar negeri Feminis Swedia.

Setelah melihat sekilas mengenai Pemilu Swedia pada tahun 2014 maka untuk dapat memahami lebih jelas enam kebijakan eksternal Feminis Swedia akan dijelaskan sebagai berikut

## **2.2. Pemenuhan terhadap HAM (Full Enjoyment of Human Rights)**

Kebijakan feminis Swedia mengharuskan negara ini untuk menerapkan kebijakannya diluar daripada teritori wilayahnya. Pertama, dalam asas pemenuhan terhadap HAM, Swedia telah melakukan upaya seperti upaya diplomasi dalam *UN General Assembly dan UN Human Rights Council* dalam upaya peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender dalam aspek internasional. Swedia juga telah mendorong *UN Human rights Council* untuk melakukan upaya dalam inklusi dan perbaikan kesehatan reproduksi dan seksual serta pemberantasan pernikahan anak dan mendorong *UN Human Rights Council* untuk mengadopsi resolusi perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Kedua, Pemerintah Swedia juga gencar dalam melakukan advokasi terhadap HAM para wanita dan kelompok LGBTI (Lesbian Gay Biseksual Transgender Interseksual) dengan melakukan kegiatan dan diskusi kebijakan pada *UN Funds and Programs*. Ketiga, Swedia memperkuat penegakan HAM terkhusus untuk wanita dan pengungsi maupun imigran dengan menggunakan pertemuan bilateral dan multilateral sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi terkait akses hak seksual dan reproduksi yang baik (*Sexual Rights Human Rights*), kesehatan, sanitasi dan pengairan yang baik. Penerapan ini

kemudian tercermin pada komitmen dan posisi Swedia dalam *UN Summit for Refugees and Migrants 2016* dimana dalam resolusi dan deklarasi tersebut Swedia dengan jelas menyatakan komitmen dan partisipasi dalam mendukung HAM dan pembangunan manusia terkhusus wanita dan anak-anak. Pemerintah Swedia juga berupaya dalam membawa isu gender dalam COP21 Paris *Climate Agreement* yang menghasilkan kampanye *Women Global Call for Climate Justice*. Fokus kampanye ini tidak lain adalah memperhatikan isu perubahan iklim dengan asas berkeadilan tanpa memarjinalkan gender tertentu dalam pelaksanaannya (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Keempat, dalam aspek pemenuhan HAM Pemerintah Swedia juga telah membawa isu ini kedalam Dewan Konsil Uni Eropa dengan berpartisipasi dalam *Gender equality Commission* dan sebagai hasilnya para pakar Swedia berhasil meluncurkan kampanye GRETA (*Group of Experts on Actions against Trafficking in Human Beings*) yang dimana kelompok ini bertanggung jawab dalam implementasi dan pengawasan terkait isu-isu konvensi terhadap perdagangan orang (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Kelima, Swedia juga mengadvokasikan ini dalam *EU Action Plan- Human Rights and Democracy* dengan mendorong Uni Eropa dalam mempertimbangkan kesetaraan gender dalam kebijakan utama Uni Eropa. Swedia pun memberi komitmen dalam *World Humanitarian Summit* di Istanbul tahun 2016 dimana Swedia mengeluarkan reportase laporan *Gender Swedish Experiences* yang bertujuan untuk memastikan para kelompok yang terkena dampak krisis humaniter dan mendukung segala aktivitas para pekerja humaniter dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender. Terakhir, pada poin ini Swedia membentuk tiga duta dalam hal HAM, demokrasi dan hukum. Dialog ini kemudian mendorong Irlandia Utara, Perancis dan Irlandia untuk mengadopsi legislasi yang sama mengenai larangan dalam penggunaan jasa prostitusi sama seperti Swedia dikarenakan prostitusi adalah bagian dari eksploitasi manusia dan melanggar HAM (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

### **2.3. Bebas dari Tindak Kekerasan Fisik, Mental dan Kekerasan Seksual (*Free From Psychological and Sexual Violence*)**

Dalam poin ini, Swedia telah melakukan promosi terhadap pentingnya isu ini dalam Dewan Keamanan PBB. Swedia telah membantu dalam membuat kriteria sanksi rezim dan menambahkan kekerasan seksual dan gender sebagai salah satu indikatornya. Bersama dengan *UN Secretary General* membuat *action plan* untuk mencegah keekrasan ekstrimisme yang dapat membahayakan perempuan dan anak-anak dalam membahas *UN Global Counter-Terrorism Strategy*. Kemudian Swedia bekerja sama dengan *International Criminal Court (ICC)* sebagai prosekutor dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan sejalan dengan ini, Swedia dan Botswana bertanggung jawab dalam memfasilitasi investigasi mengenai kejahatan berbasis kekerasan seksual dibawah naungan piagam ICC (Sweden Ministry of Foreign Affairs,2017). Selain itu, Swedia juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap kaitan antara pembelian senjata ringan dan kekerasan berbasis gender. Tindakan tersebut memberikan titik terang dalam badan PBB untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai negara untuk dapat menangani hal tersebut dan melakukan pengendalian senjata dalam skala internasional. Dalam skala regional Uni Eropa, melakukan upaya untuk membentuk *European External Action Service (EEAS)* dalam perihal kekerasan berbasis gender dan mendorong Uni Eropa untuk membentuk pendekatan berbasis respon gender dan menaruh perhatian khusus terhadap isu-isu ini (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Swedia melakukan inisiasi dengan menjadi penggerak utama dalam *Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies* dan merupakan inisiasi yang berupaya untuk mengajak negara dan seluruh komponennya dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dan meningkatkan kepekaan terhadap kekerasan berbasis gender sebagai perihal darurat kemanusiaan. Swedia mengajak 17 anggota dan menghimpun 50 anggota secara keseluruhan dalam membuat 310 komitmen untuk membentuk *Development Assistance Committe* untuk menyempurnakan rencana pembentukan kerangka kerja dalam *Call Action Road Map* untuk koordinasi dengan *Coordination of Humanitarian*

*Affairs* (OCHA). Bersama dengan ini, Swedia menjadi pemimpin komite dalam *Steering Committee* dalam *World Humanitarian Summit* di Istanbul pada tahun 2016 (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Swedia juga menjadi donor terbesar dalam *UN Women dan UN Action Against Sexual Violence in Conflict* dan Swedia mendorong Uni Eropa dan negara lain dalam mengimplementasikan Konvensi Konsil Eropa mengenai pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan domestik. Terakhir, Swedia juga melakukan reintegrasi terhadap para tentara Somalia dan mendukung mereka dengan bantuan finansial serta upaya untuk memberantas kekerasan terhadap wanita (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

#### **2.4. Partisipasi Wanita dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik dalam Masa Sebelum dan Sesudah Konflik (*Participation in Preventing and Resolving Conflict and Post Conflict Building*)**

Dalam isu ini, Swedia telah membentuk rencana nasional baru untuk implementasi yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya terkait perempuan, perdamaian dan keamanan (*women, peace, and security*). Rencana ini akan ditujukan untuk kementerian dan badan pemerintah serta kedutaan dan mendorong Swedia dalam membangun dialog internasional dengan lima negara berkonflik dan negara paska konflik. Kemudian, Swedia juga mendirikan jaringan untuk dialog yang mendukung partisipasi wanita dalam membangun perdamaian di negara-negara nordik. Selanjutnya, Swedia juga mendorong pembentukan jaringan yang sama dalam area Mediterania dan Uni Afrika (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Selain itu, Swedia juga berkontribusi dalam International Dialogue on Peacemaking and State building melalui Deklarasi Stockholm yang diadopsi tahun 2016. Kemudian Swedia juga berkontribusi dalam perjanjian damai Kolombia dalam inkorporasi gender yang baik dan menjadi model untuk beberapa negara lain. Terakhir, Swedia juga berpartisipasi dalam *Women Advisory Committee* untuk Syria dan berkontribusi dalam meningkatkan peran wanita dalam perundingan perdamaian di Genewa bersama PBB serta Swedia menginisiasi dialog perdamaian di Afganistan melalui Kedutaan Besar Swedia dan bekerjasama dengan Folke Bernadotte

Academy. Tujuan dari dialog ini ialah untuk menyediakan sarana bagi wanita dalam level lokal dan provinsi dalam mendukung partisipasi dan peran wanita dalam pembangunan perdamaian (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

### **2.5. Partisipasi dalam Pemilu (*Political Participation and Influence of Women and Girls in All Areas of Society*)**

Dalam hal mendukung wanita dalam partisipasi politiknya, Swedia telah mengadvokasikan kebebasan berpendapat dengan memperkuat jurnalis wanita, para aktivis HAM dan para aktivis lingkungan, politisi serta pekerja budaya. Upaya ini telah menghasilkan Swedia sebagai pelopor dalam Seminar *Sweden's Freedom of the Press Act* yang ke 250. Selain itu Swedia juga mendorong implementasi Uni Eropa yang tertuang dalam *EU Action Plan on Human Rights and Democracy* pada tahun 2015-2019. Swedia juga memastikan bahwa *EU Gender Action Plan 2016-2020 (GAP II)* akan mendiskusikan dan membahas isu pemberdayaan perempuan dan mendorong negara di Uni Eropa untuk mengadopsi *Action Plan* kedalam undang-undang negara masing-masing dan menerapkannya. Kemudian Swedia melalui kedutaan besarnya di Somalia untuk mendorong representasi wanita dalam pemilu bertambah. Setelah itu, melalui kooperasi dan dialog serta diplomasi yang intensif dengan berbagai aktor, Swedia berhasil dalam menubuhkan pertambahan angka dalam representasi wanita dalam pemilu Somalia meningkat dari 14 menjadi 20 persen pada pemilu yang diadakan (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Selain di Somalia, di Moldova Swedia melalui kedutaan besarnya juga berupaya mempromosikan wanita dalam partisipasi politik melalui program *Women in Politics (WiP)*. Program yang dilaksanakan pada 2016 ini mendorong pembangunan kapasitas partisipasi wanita dalam pemilu. Melalui program ini juga, Swedia berkontribusi dalam mendorong Moldova dalam mengadopsi sebuah hukum yang mengharuskan bahwa partisipasi wanita dalam pemilu setidaknya terdapat empat puluh persen. Terakhir, melalui kedutaan besarnya di New Delhi, Swedia mengadakan seminar pelatihan menulis dan berkolaborasi dengan para penulis India untuk meningkatkan kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan melalui tulisan yang akan dimuat dalam berbagai media di dalam negeri (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

## **2.6 Pemenuhan terhadap Hak Ekonomi dan Pembangunan (*Economic Rights and Empowerment*)**

Dalam upaya untuk memenuhi hak ekonomi dan pembangunan, Swedia telah mendorong Uni Eropa dalam kebijakan perdagangan bebas bersama dengan WTO untuk meningkatkan perekonomian negara dunia ketiga dan sekali lagi tidak melupakan pendekatan berbasis kesetaraan gender. Pada tahun 2017, Swedia juga turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran terkait kesetaraan gender dalam *Fifth Global Review of Aid for Trade* dimana langkah lebih jauhnya Swedia juga memberikan sokongan finansial dalam *United Nations Conference on Trade and Development* dalam memberikan indikator penilaian dan pengukuran terhadap perdagangan yang tidak bias gender (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017). Kemudian, Swedia juga gencar dalam menginisiasi kooperasi *Global Deal* yang dilakukan dengan Bangladesh yang berujung pada dialog mengenai peningkatan kualitas hidup pekerja tekstil Bangladesh yang didominasi oleh wanita, yang juga bekerja sama dengan ILO dan merek *H&M* serta *IF Metall* (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Untuk perihal kampanye, Swedia menjadi pelopor sekaligus penanggung jawab kampanye yang berupaya mengingatkan kembali pentingnya peran kesetaraan gender. Melalui kampanye *HeforShe* yang mendukung para ayah atau pola pengasuhan ayah yang diuji coba di Belarus dan Rusia. Alhasil gerakan ini merebah Tiongkok seperti "*Baba Shanghai*", "*Ugandan Dads*", "*Thai Dads*" dan lainnya. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa peran ayah dan ibu sama besarnya dalam rumah tangga dan kehidupan anak-anak. Selain kampanye, Swedia juga mendukung program *Woman Economic Empowerment Forum* di Timur tengah dan Afrika Utara untuk mendukung pemberdayaan ekonomi wanita di kawasan tersebut. Swedia juga melakukan hal serupa di negara bagian Balkan Barat melalui program *EBRD Women Business Program* dengan memberikan dukungan pembangunan dan sokongan model pinjaman terhadap pengusaha wanita agar dapat mempermudah mereka dalam melakukan peminjaman dana di bank, sama halnya dengan Swedia dimana para pengusaha wanita dipermudah urusannya dalam melakukan peminjaman dana. Terakhir, di



Ethiopia Swedia berkontribusi dalam 21.000 anak perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah, 5700 anak perempuan yang mendapatkan subsidi bekal makan siang dan 800 anak perempuan yang mendapat bantuan seragam baru. Kegiatan itu dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah diakibatkan pernikahan dini (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

## **2.7 Hak Reproduksi dan Seksual yang Sehat (*Sexual and Reproductive Health and Rights*)**

Pada isu yang terakhir ini, Swedia mengkoordinasikan Konferensi “*She Decides*” yang diadakan di Brussel pada Maret 2017 bersama dengan Belgia, Belanda dan Denmark. Konferensi ini merupakan bagian dari upaya untuk mobilisasi terhadap dukungan finansial dan politik terkait isu kesehatan dan reproduksi seksual dalam ranah internasional. Dalam konferensi tersebut, Swedia juga berkomitmen dalam memberikan sokongan dana sebesar 200 Juta SEK untuk upaya peningkatan hak dan kesehatan reproduksi seksual (SRHR). Kemudian, Swedia juga gencar dalam mengirim surat kepada UNDP, UNFPA, UNICEF dan UN Women untuk mempertimbangkan rencana strategis Swedia untuk diterapkan dalam jangka waktu 2018-2021 mengenai isu hak dan kesehatan reproduksi seksual (Sweden ministry of Foreign Affairs, 2017). Dalam dukungannya, Swedia dengan UNFPA mencegah terjadinya 657.000 kehamilan tidak terencana, 204.000 tindak aborsi yang tidak sehat serta menyediakan 1,6 juta alat kontrasepsi. Alhasil, 90 komunitas lokal yang menjadi sadar dan berhenti untuk melakukan tindak kekerasan (pemotongan) pada alat genital wanita. Dalam skala regional, Swedia mendorong Uni Eropa dalam Komisi Eropa untuk menjadi organisasi yang memberi dukungan lebih dalam kepekaan terhadap isu ini. Dimana akhirnya dalam rapat yang diadakan pada bulan Mei 2015, terdapat hampir sepuluh negara yang menyurati dukungan untuk ide Swedia dan mendesak Uni Eropa (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Kedutaan besar Swedia di Mozambique juga telah berkontribusi dalam memberikan dorongan ke pemerintah dengan menyediakan kerangka pembangunan dan petunjuk terkait standar yang baik dalam aborsi. Masih di

belahan tanah Afrika, tepatnya Zambia, program pencegahan kehamilan anak Swedia berhasil meneka hingga 50.000 kasus kehamilan tak terencana. Lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2015 kampanye Swedia terkait *Midwives4all* yang dilaksanakan di Uganda telah mendorong wanita di Uganda menjadi para wanita yang memiliki bekal kebidanan paling tidak untuk meningkatkan taraf hidup dan pengetahuan wanita di Uganda mengenai betapa pentingnya peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi seksual bagi wanita (Sweden Ministry of Foreign Affairs, 2017).

### ***2.8 Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)***

Selain Kementerian Luar Negeri Swedia terdapat badan lain yang menjadi penggerak dalam penerapan kebijakan luar negeri feminis yakni SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*). SIDA merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1995 oleh Pemerintah Swedia atau secara spesifik yakni Kementerian Luar Negeri Swedia dimana SIDA memiliki tanggung jawab atas tugas yang dimiliki kepada Pemerintah dan Parlemen Swedia (Enghel, 2019). Sebagai badan pemerintah yang bertugas dalam ranah pembangunan dan kerjasama dan mewujudkan cita-cita serta kebijakan pembangunan Pemerintah Swedia. Peran SIDA sebagai badan donor finansial dalam bantuan internasional yang diberikan kepada negara penerima tidak menjadikan SIDA sebagai badan yang mengintervensi negara dalam penggunaan bantuan donor, melainkan menjadi mitra penerima donor dalam melaksanakan program pembangunan yang berasal dari donor SIDA. Adapun sumber dana yang disalurkan SIDA untuk bantuan internasional yang berasal dari penerimaan pajak negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Dengan demikian, segala rencana kerja yang dimiliki SIDA akan selalu sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan nasional dan luar negeri Pemerintah Swedia (SIDA, 2019).

Dalam mewujudkan pembangunan dan kesetaraan gender yang baik terdapat tiga aspek dalam upaya menegakkan kesetaraan gender. Upaya tersebut yakni upaya dalam; peningkatan kesehatan reproduksi yang baik (*sexual rights human rights*), pemberdayaan perekonomian perempuan, pendidikan dan akses

sanitasi yang mumpuni. Aspek pertama yakni peningkatan kesehatan reproduksi yang baik untuk semua kalangan masyarakat terkhusus perempuan. Swedia merupakan salah satu negara yang menjadi negara terdepan dalam hal kualitas pengetahuan kebidanan yang baik. Memiliki kelebihan dalam aspek kebidanan, Swedia kemudian mendorong SIDA untuk menjadi pelopor dalam bidang kesehatan reproduksi dan seksual. Hal ini terbukti dengan hampir 60% dana yang dimiliki SIDA untuk donor digunakan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual negara target donor (SIDA, 2018). Kemudian untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya akses kesehatan reproduksi seksual yang baik, pemerintah Swedia melalui Kementerian Luar Negeri Swedia meluncurkan kampanye dengan tagar *#midwives4all* yang merupakan sebuah gerakan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi seksual, kebidanan dan pentingnya pengetahuan tentang kebidanan.

Gerakan *#midwives4all* yang dilaksanakan oleh Swedia ini diterapkan di Ethiopia dan Bangladesh. Ethiopia sendiri, sejak tahun 2000, penurunan angka kematian ibu melahirkan di Ethiopia mencapai angka 871 kematian per 100.000 kelahiran. Namun, sejak tahun 2016 dengan program *#midwives4all* Swedia, angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 412 kematian per 100.000 kelahiran yang ada di Ethiopia. Dengan penurunan angka kematian ibu melahirkan di Ethiopia menunjukkan keberhasilan program kebijakan luar negeri feminis Swedia yang dalam hal ini dilakukan oleh SIDA sebagai badan pemerintah Swedia yang berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesetaraan gender. Selain itu, di Bangladesh angka kematian ibu menurun drastis hingga setengah dari jumlah kematian sebelumnya. Namun upaya yang dilakukan dirasakan belum maksimal mengingat pada tahun 2015 angka kematian ibu melahirkan mencapai 176 orang per 1000 kelahiran dan terdapat 24 kematian per 1000 kelahiran bayi baru lahir. Untuk menanggulangi celah tersebut, Asosiasi Kebidanan Swedia yang didanai oleh Kedutaan Besar Swedia Bangladesh menginisiasi program pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dengan Asosiasi Kebidanan Bangladesh dengan melaksanakan program

pelatihan, bimbingan terkait kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi seksual lainnya. Keberhasilan yang dicapai melalui pelatihan ini kemudian mendorong Pemerintah Bangladesh untuk berkomitmen dalam meningkatkan jumlah bidan di Bangladesh sebanyak 3000 orang (SIDA, 2018). Dengan demikian keberhasilan program dan peningkatan kesehatan seksual dari promosi kampanye serta pelatihan yang dilakukan Swedia menunjukkan bahwa kebijakan Feminisme yang dipromosikan Swedia sejalan dengan upaya dan bukti implementasi yang dilakukan terkhusus dalam bidang jaminan hak-hak kesehatan dan reproduksi seksual yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selain *#midwives4all* yang berfokus pada kebidanan, upaya SIDA dalam meningkatkan kesehatan dan reproduksi seksual lainnya yakni peningkatan hak dan kesehatan reproduksi dan seksual yang terhindar dari HIV. Program ini dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dimana program ini berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan remaja di Zambia dan pencegahan penularan HIV dan AIDS di Zambia mengingat jumlah penyebaran di negara ini cukup tinggi. Dalam program ini, SIDA mengeluarkan dukungan finansial sebesar 408 juta SEK Swedia dan bekerjasama dengan USAID (*United States Agency for International Development*). Selain mengurangi angka remaja rerinfeksi HIV, program ini bertujuan untuk mengurangi kematian bayi baru lahir dan bayi stunting yang diakibatkan kurangnya pengetahuan masa kehamilan dan gizi buruk. Dengan dana yang cukup besar, program ini diharapkan membangun 190 fasilitas kesehatan beserta dengan tenaga kesehatan yang mumpuni di Zambia (SIDA, 2017). Fasilitas kesehatan ini kemudian diharapkan dapat menjadi pelopor kesehatan ditengah-tengah masyarakat dan menjadi penyedia layanan informasi serta kesehatan yang baik untuk masyarakat Zambia.

Kemudian dalam aspek ekonomi, SIDA pada tahun 2015-2019 bersama dengan *Oxfam International* melakukan upaya peningkatan penghasilan para petani di Palestina melalui program Produksi Pertanian dan Sistem Pasar yang berkeadilan (*Equitable Agricultural Production and Market System*). Adapun sokongan finansial yang diberikan oleh SIDA yakni sebesar 91 juta SEK

untuk empat tahun pelaksanaan program. Tujuan program ini ialah peningkatan perekonomian para petani yang berada di Gaza dan *West Bank* serta bagian timur Jerusalem. Mengingat Palestina sekarang merupakan negara yang sedang dalam konflik, maka diperlukan adanya bantuan ekonomi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Palestina (SIDA,2017). Peningkatan kondisi perekonomian merupakan bagian dari upaya kesetaraan gender yang baik, dimana tidak hanya petani laki-laki, perempuan dan kelompok lainnya akan sangat terbantu bila sektor ini ditingkatkan.

Terakhir dalam aspek pendidikan dan sanitasi yang baik. Kontribusi SIDA dalam aspek pendidikan yang baik yakni sejak tahun 2013 SIDA bersama *Raoull Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* (RWI) memeberikan kesempatan beasiswa kepada 8-10 anak perempuan setiap tahunnya agar dapat mengemban pendidikan dibangku perguruan tinggi. Beasiswa ini diharapkan agar terciptanya keadaan kesetaraan gender dalam pendidikan yang setara baik untuk laki-laki dan perempuan. Beasiswa ini ditujukan untuk anak dari kalangan yang kurang mampu dan diharapkan menjadi jalan dalam mengentaskan kemiskinan (SIDA,2020). Selanjutnya dalam aspek sanitasi, melihat kondisi dan keadaan dari para pekerja wanita Bangladesh yang sering mengalami masalah kesehatan paska menstruasi dimana para pekerja yang kekurangan akses dan biaya terhadap pembalut wanita. Hal ini menyebabkan para pekerja menggunakan percahan kain kotor yang mereka dapati dari pabrik garmen tempat mereka bekerja. Dengan kondisi seperti ini, SIDA mendorong dan mendukung peningkatan dan perbaikan terhadap kondisi ini dengan mendorong produksi "*banapad*" merupakan produk pembalut berasal dari serat pisang dan ramah lingkungan serta dengan harga yang lebih murah (SIDA,2019).

## **2.9 Kesimpulan**

Dalam melakukan penerapan enam kebijakan eksternal ini, Swedia mengalami beberapa dinamika sebelum kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan Partai Sosial Demokrat dalam menduduki parlemen Swedia, menggaet Partai Hijau sebagai mitra dalam kolaborasi untuk menjadi koalisi yang

memimpin pemerintahan. Selain itu dapat dilihat bahwasanya enam kebijakan eksternal ini merupakan bentuk aktualisasi dari komitmen Swedia. Dapat dilihat bahwasanya kebijakan ini tidak hanya dilakukan dalam ranah domestik Swedia namun seyogyanya kebijakan luar negeri yang dilakukan diluar teritori wilayah maka Swedia berusaha untuk mendorong pihak lain dalam membantu negaranya mewujudkan cita-cita kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri Feminis.

Adapun beberapa poin yang dapat disoroti dalam kebijakan ini ialah tak lain bahwa kebijakan ini dapat menjadi bukti komitmen pemerintah Swedia. Kebijakan ini pun berhasil mendorong kesuksesan seperti berkurangnya angka kehamilan dini yang tidak terencana, peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender dan pentingnya pencegahan dan penanganan yang tepat untuk kekerasan berbasis gender yang dapat dilihat sebagai akar dari berbagai konflik. Sebagai negara yang pertama kali menyatakan secara eksplisit sebagai negara dengan kebijakan Feminis, Swedia telah membuktikan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun dengan menuai banyak keberhasilan. Selain keberhasilan penerapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Swedia, upaya dan komitmen SIDA dalam peningkatan dan kualitas hidup yang lebih baik untuk semua kalangan terkhusus perempuan yang dimana kondisi mereka sering terabaikan dan tidak diuntungkan. Bentuk dukungan finansial dan bimbingan yang dilakukan SIDA merupakan demonstrasi dari upaya Swedia dalam menegakkan kesetaraan gender dan bentuk implementasi kebijakan luar negeri feminis yang telah dirumuskan Swedia.